

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hhasil penelitian dan pembahasan mengenai mengenai kemampuan keuangan daerah dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kinerja keuangan daerah dari tahun 2017-2020 dikategorikan masih kurang, dapat dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal selama 4 tahun dengan rata-rata 4,65% diklasifikasikan dalam kriteria sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah selama 4 tahun dengan rata-rata 81,89% diklasifikasikan dalam kriteria sangat tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah selama 4 tahun dengan rata-rata 5,66% diklasifikasikan dalam kriteria sangat rendah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah selama 4 tahun dengan rata-rata 100,11% diklasifikasikan dalam kategori sangat efektif, rasio keserasian belanja operasi selama 4 tahun dengan rata-rata sebesar 58,59%, rasio keserasian belanja modal selama 4 tahun dengan rata-rata 41,35%, rasio efisiensi belanja selama 4 tahun dengan rata-rata 88,87% diklasifikasikan dalam criteria cukup efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat besar ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo terhadap sumber-sumber dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Rasio pertumbuhan pendapatan selama 4 tahun rasio pertumbuhan pendapatan dengan rata-rata sebesar 5,78% dan rasio pertumbuhan belanja ada dua yaitu

perumbuhan belanja operasi dengan rata-rata sebesar 11,61% dan pertumbuhan belanja modal dengan rata-rata sebesar 27,01%.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan peningkatan kinerja keuangan daerah dicapai melalui pemanfaatan tenaga atau sumber daya manusia yang berkompeten didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan dukungan financial yang dijuluni oleh regulasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian

Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah terutama di sektor Pendapatan Asli Daerah, komponen Pendapatan Asli Daerah yang perlu untuk diupayakan adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur serta melaksanakan sosialisasi pentingnya membayar pajak bagi masyarakat perlu untuk dilakukan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian pada masing-masing rasio agar terdapat focus penelitian yang jelas sehingga diketahui permasalahan dari masing-masing rasio

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Halim A. (2007) *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim A. (2011) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Jayadi Ayu (2014) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP” *Jurnal akuntansi keuangan*, Vol. 5, No. 2 September 2014
- Khairunnisa (2018), “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemeirntah Kota Medan”
- Lantang Kisma (2018), “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Poso”. *Jurnal EKOMEN* Vol. 18 No. 2 –September 2018
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta:UPM STIM YKPN
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Muntuan Feronika(2013-2016) "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan". *Home>Vol 3, No 3(2018)*
- Pangkey R. H. Aldy (2011-2015) ”Analisis Kinerja Keuangan Pemeirntah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. *Home> Vol 5 No.3 (2017)*
- Putri Nurhayati Ika (2018), “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang”
- Sunaria Heni (2014) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2013”*Jurnal Akuntansi (JA)* Vol. 1, September 2014
- Vendra Reza, Latri Wihastuti (2017) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman” etd.repository.ugm.ac.id